

PERAN ARSIPARIS DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS
DAN TRANSPARANSI PERSURATAN DI BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN
PROVINSI BALI

The Role of Archivists in Enhancing Correspondence Accountability
and Transparency at Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Representative Office of Bali Province

Cindy Sidabutar & I Kadek Rian Prayana

Universitas Udayana

sidabutarcindy10@gmail.com ; rian.prayana@unud.ac.id

Article Info:

Submitted: Revised: Accepted: Published:

Nov 13, 2025 Dec 6, 2025 Dec 18, 2025 Dec 23, 2025

Abstract

This study is grounded in the importance of archives as legal and administrative instruments that safeguard the integrity of governmental processes, as well as in the challenges of archival digitization that demand archivists' professionalism, particularly in state audit institutions such as the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI). The study aimed to analyze the role of archivists in enhancing accountability and transparency in correspondence management at BPK RI Representative Office of Bali Province. Using a descriptive qualitative method through interviews, observations, and document studies, this research examined the implementation of regulation-based archival and correspondence management, particularly through the use of the JASMIN application, *Tata Naskah Dinas*, *Kode Klasifikasi Arsip*, and *Jadwal Retensi Arsip*. The

findings showed that archivists hold a strategic role as controllers of correspondence flows, guardians of audit document integrity, and mediators between public information disclosure and the protection of sensitive data. Digitization through JASMIN strengthened document traceability and security; however, the limited number of archivists remains a major obstacle to consistent archival management in each work unit. The study recommends increasing archivist human resources, providing continuous training, and strengthening inter-unit coordination as strategic measures to achieve more accountable, transparent, and sustainable archival governance within BPK RI Representative Office of Bali Province.

Keywords: Archivists; Accountability; Correspondence Transparency; Archival Digitization; Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI)

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya arsip sebagai instrumen hukum dan administrasi yang menjamin integritas proses pemerintahan, serta oleh tantangan digitalisasi kearsipan yang menuntut profesionalisme arsiparis, khususnya pada lembaga pemeriksa negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Penelitian ini bertujuan menganalisis peran arsiparis dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi persuratan di BPK RI Perwakilan Provinsi Bali. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, penelitian ini menelaah implementasi pengelolaan arsip dan persuratan berbasis regulasi, khususnya melalui penggunaan aplikasi JASMIN, Tata Naskah Dinas, Kode Klasifikasi Arsip, dan Jadwal Retensi Arsip. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arsiparis memiliki peran strategis sebagai pengendali alur persuratan, penjaga integritas dokumen audit, serta mediator antara keterbukaan informasi publik dan perlindungan data sensitif. Digitalisasi melalui JASMIN memperkuat keterlacakan dan keamanan dokumen, namun keterbatasan jumlah arsiparis masih menjadi hambatan utama bagi konsistensi pengelolaan arsip di setiap unit kerja. Penelitian ini merekomendasikan penambahan sumber daya manusia arsiparis, pelatihan berkelanjutan, dan penguatan koordinasi antarunit sebagai langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola arsip yang lebih akuntabel, transparan, dan berkelanjutan di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.

Kata Kunci: Arsiparis; Akuntabilitas; Transparansi Persuratan; Digitalisasi Arsip; Badan Pemeriksa Keuangan

PENDAHULUAN

Arsip merupakan instrumen vital dalam sistem administrasi pemerintahan yang berfungsi menjaga jejak akuntabilitas dan integritas kelembagaan. Keberadaan arsip bukan hanya berorientasi pada penyimpanan dokumen, melainkan menjadi sarana pembuktian legal dan representasi tanggung jawab publik atas setiap tindakan birokrasi (Rantiasih, 2022). Dalam kerangka negara hukum, setiap arsip memiliki kekuatan pembuktian yang melekat karena merekam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi pemerintahan. Namun, nilai strategis arsip tersebut hanya dapat terwujud apabila arsip dikelola secara tertib, autentik, dan dapat ditelusuri. Di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Perwakilan Provinsi Bali, kondisi ini menghadapi tantangan nyata di lapangan terutama pada aspek ketertiban persuratan, konsistensi dokumentasi hasil audit, serta kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi digitalisasi kearsipan. Meskipun BPK merupakan lembaga pemeriksa negara yang dituntut menjamin transparansi dan objektivitas laporan keuangan daerah, tidak jarang ditemukan kendala seperti perbedaan kualitas dokumentasi antarunit pemeriksaan, keterlambatan pemrosesan surat masuk atau keluar, serta belum meratanya kapasitas pengelolaan arsip digital di masing-masing unit kerja. Permasalahan ini berdampak pada proses audit karena arsip yang tidak tertib berpotensi menghambat pelacakan dokumen, memperlambat tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan menurunkan keandalan informasi publik.

Untuk mencapai pengelolaan arsip yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan, dibutuhkan arsiparis yang memiliki kemampuan teknis, pengetahuan kearsipan, serta pemahaman teknologi informasi. Ini dapat dilihat ketika dihadapkan pada realitas lapangan di BPK RI Perwakilan Provinsi Bali. Arsiparis tidak hanya dituntut mengelola arsip secara teknis, tetapi juga memastikan integritas informasi audit yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pemeriksaan. Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa peran strategis ini belum sepenuhnya optimal, salah satunya karena jumlah arsiparis yang masih terbatas serta beban dokumen pemeriksaan yang meningkat setiap tahun. Kondisi ini menyebabkan sebagian proses pengelolaan arsip dinamis masih bergantung pada pegawai non-arsiparis yang tingkat pemahamannya terkait kaidah kearsipan tidak merata. Dengan demikian, meskipun standar Tata Naskah Dinas dan Kode Klasifikasi Arsip telah ditetapkan, implementasinya tidak selalu seragam, sehingga berpengaruh pada kualitas keterlacakan dokumen pemeriksaan (*traceability*) (Supriatna et al., 2025).

Di sisi lain, prinsip good governance khususnya akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas mengharuskan setiap informasi pemerintahan dapat diakses dan diverifikasi secara jelas (Nurhidayat, 2023). Tantangan ini semakin berat dengan adanya peralihan menuju sistem persuratan elektronik (JASMIN). Walaupun sistem ini secara teoritis mendukung keterbukaan dan efisiensi, pada praktiknya masih ditemukan beberapa hambatan, seperti disparitas kemampuan penggunaan aplikasi antarpegawai, keterlambatan input surat dari unit tertentu, serta kendala integrasi antara dokumen fisik dan digital. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik, serta kebutuhan mendesak akan peran arsiparis yang lebih kuat dan terstruktur untuk mengawal transisi digital.

Permasalahan lain yang muncul adalah kebutuhan menjaga keseimbangan antara transparansi informasi publik dan kerahasiaan dokumen audit, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan UU BPK 15/2006. Temuan lapangan melalui wawancara menunjukkan bahwa permintaan informasi publik seringkali melibatkan arsip audit yang bersifat terbatas. Tanpa sistem klasifikasi akses terpadu (SSKAD), arsiparis dihadapkan pada risiko salah memberikan akses yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Hal ini mempertegas urgensi penguatan kapasitas arsiparis dalam menjaga integritas lembaga melalui sistem persuratan dan pengelolaan arsip yang memenuhi standar keamanan sekaligus transparansi.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian mengenai peran arsiparis di BPK RI Perwakilan Provinsi Bali menjadi penting dan relevan. Studi ini tidak hanya membahas teori kearsipan secara konseptual, tetapi juga menelaah bagaimana teori tersebut diterapkan dalam kondisi empiris yang penuh tantangan, terutama dalam proses digitalisasi, peningkatan standar akuntabilitas, serta kebutuhan efektivitas dokumentasi audit. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dan rekomendasi praktis untuk memperkuat penerapan prinsip akuntabilitas melalui peran arsiparis sebagai aktor kunci dalam sistem pengelolaan arsip pemerintahan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang berorientasi pada pemahaman mendalam terhadap peran arsiparis dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi persuratan di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Bali. Pendekatan ini digunakan karena fenomena kearsipan bersifat kontekstual dan tidak dapat direduksi menjadi angka, melainkan harus diinterpretasikan melalui makna sosial, struktur kelembagaan, serta praktik administratif yang melekat pada profesi arsiparis. Kajian kualitatif memungkinkan peneliti menafsirkan hubungan antara pengelolaan arsip, tata naskah dinas, dan implementasi prinsip good governance yang menjadi landasan hukum dalam pengelolaan dokumen publik (Yin, 2018). Dalam disiplin kearsipan, pendekatan ini sangat relevan karena menekankan pentingnya pemahaman terhadap siklus hidup arsip yang mencakup penciptaan, penggunaan, penyimpanan, hingga penyusutan arsip. Melalui penelitian kualitatif, peran arsiparis dapat dianalisis tidak hanya sebagai pengelola dokumen

administratif, tetapi juga sebagai agen etika informasi yang menjamin transparansi dan akuntabilitas birokrasi.

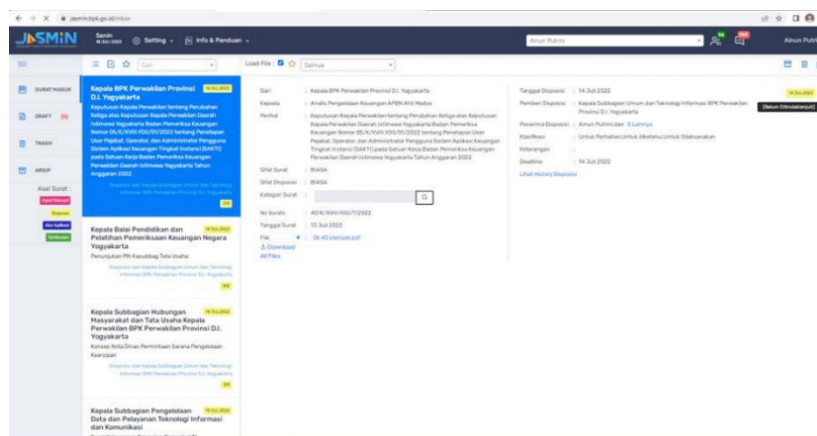
Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan yaitu Oktober sampai Desember 2025. Lokasi penelitian ditetapkan di BPK RI Perwakilan Provinsi Bali karena lembaga ini menjadi representasi vertical BPK di tingkat daerah dengan sistem kearsipan yang kompleks dan teregulasi secara ketat melalui Peraturan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas. Subjek penelitian meliputi arsiparis yang berperan dalam pelayanan publik berbasis arsip. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga prosedur utama, yaitu wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang dapat dilakukan dengan tatap muka maupun tidak dengan tujuan tertentu, misalnya untuk mendapatkan informasi atau mengumpulkan data (Fadhallah, 2020). Hal ini menggali pemahaman informan mengenai fungsi, kendala, dan strategi pengelolaan arsip di BPK RI Perwakilan Provinsi Bali. Kemudian, peneliti juga menggunakan observasi untuk melihat kegiatan di lapangan. Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati langsung fenomena atau perilaku yang terjadi di lapangan (Romdona et al., 2024). Observasi langsung dilakukan untuk melihat penerapan nyata sistem persuratan secara menua, serta interaksi arsiparis dengan sistem informasi internal lembaga. Sementara itu, dokumentasi adalah pengamatan secara langsung untuk mendapatkan data yang diperoleh peneliti sesuai dengan pembahasan (Prawiyogi et al., 2021). Studi dokumentasi meliputi penelaahan terhadap laporan kinerja BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, standar operasional prosedur, kebijakan kearsipan, serta arsip audit yang telah dilegalisasi. Kombinasi ketiga teknik tersebut menciptakan data yang kaya, mendalam, dan saling melengkapi sehingga mampu memotret realitas pengelolaan arsip.

Prosedur analisis data dilakukan dengan mengadaptasi model interaktif dari (Matthew B Miles, A Michael Huberman, 2020) yang terdiri atas tiga tahap utama, yakni reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap reduksi data, informasi yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dideleksi, dikategorikan, dan disusun sesuai tema penelitian agar tidak kehilangan konteks kearsipan. Tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun narasi analitis yang menghubungkan temuan empiris dengan teori kearsipan dan prinsip akuntabilitas publik. Sementara tahap penarikan kesimpulan melibatkan interpretasi mendalam terhadap data yang telah disintesis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan

metode, sehingga setiap temuan diuji konsistensinya berdasarkan kesesuaiannya antar informan dan antar teknik pengumpulan data. Dalam konteks penelitian arsip, triangulasi memiliki signifikansi ganda karena menjamin kebenaran empiris sekaligus memastikan autensitas dan reliabilitas dokumen yang menjadi objek kajian. Dengan demikian, seluruh tahapan metode ini dirancang untuk menghasilkan pemahaman ilmiah yang komprehensif dan berakar pada praktik profesional kearsipan di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.

HASIL

Hasil penelitian yang dikaji melalui data sekunder dari Laporan Kinerja BPK RI Perwakilan Provinsi Bali Tahun 2023 memperlihatkan bahwa kearsipan di lembaga tersebut telah mengarah pada penguatan sistem tata naskah dinas yang berorientasi pada transparansi dan akuntabilitas publik. Berdasarkan dokumen tersebut, pengelolaan surat masuk, surat keluar, serta arsip pemeriksaan dilaksanakan melalui prosedur yang terintegrasi dengan sistem persuratan elektronik yang memungkinkan pelacakan status dokumen secara real time. Arsiparis memiliki peran krusial dalam menjaga kesinambungan dokumentasi hasil pemeriksaan, mulai dari tahap perencanaan audit, korespondensi dengan entitas pemeriksaan, hingga penyusunan laporan hasil pemeriksaan yang sah secara administratif. Arsiparis juga berfungsi sebagai penjaga integritas informasi, memastikan bahwa setiap dokumen audit disimpan, diklasifikasi, dan diakses sesuai dengan hierarki kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas. Melalui sistem ini, transparansi tidak dimaknai sebagai keterbukaan mutlak, melainkan sebagai keterbukaan yang terkendali, yakni kemampuan lembaga untuk menyediakan akses informasi tanpa mengabaikan prinsip kerahasiaan negara dan perlindungan data publik. Penerapan tata kelola arsip yang terstandarisasi tersebut memperlihatkan korelasi langsung antara profesionalisme arsiparis dengan peningkatan efisiensi administratif, kecepatan layanan informasi, serta kredibilitas lembaga di hadapan publik dan entitas pemeriksaan. Dengan demikian, arsiparis di BPK RI Perwakilan Provinsi Bali tidak hanya berperan sebagai pelaksana administratif tetapi juga sebagai aktor penjamin akuntabilitas kelembagaan yang menautkan dimensi hukum, etika, dan teknis dalam satu sistem manajemen arsip.



Gambar 1. Kotak Masuk Aplikasi JASMIN

Melalui wawancara dengan ibu Yustina Oktyani Andriasari, S.T. dari Subbagian Umum bidang kearsipan kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali beliau menyatakan "*Alur kerja pengelolaan surat masuk dan surat keluar di BPK RI Perwakilan Provinsi Bali dibedakan menjadi dua yakni surat masuk inter dan surat masuk eksternal yang berasal dari BPK perwakilan yang ada di masing-masing provinsi dan BPK Pusat yang ada di Jakarta*" hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan persuratan di BPK RI Perwakilan Provinsi Bali telah tersusun secara sistematis melalui dua alur kerja yakni yang pertama surat masuk internal yakni surat masuk yang berasal dari instansi yang sama yakni BPK terdapat BPK Pusat di Jakarta maupun BPK Perwakilan yang ada di masing-masing provinsi. Kemudian alur yang kedua surat masuk internal yakni pemanfaatan aplikasi JASMIN (Jaringan Surat Menyurat Kedinasan) sebagai platform utama untuk memproses surat masuk. Sedangkan surat masuk eksternal dapat diterima secara fisik/hardcopy yang dikirim ke kantor, atau melalui email (humastu.bali@bpk.go.id) ataupun melalui nomor Whatsapp. Seluruh alur persuratan, melalui dari penerimaan surat, pencatatan, disposisi, hingga tindak lanjut, terdigitalisasi sehingga meningkatkan keterlacakan (traceability) dokumen secara signifikan. Kegiatan penyampaian nota dinas menggunakan buku ekpedisi dan diinput ke dalam Aplikasi Jasmin, karena nota dinas merupakan jawaban surat yang berlaku untuk kalangan internal saja. Sedangkan penyampaian surat keluar selain menggunakan buku ekpedisi, juga dilakukan pencatatan di buku agenda surat keluar dan menggunakan amplop tertutup kemudian diantar ke alamat tujuan atau dikirimkan melalui email. Sistem ini memastikan bahwa setiap aktivitas birokratis terekam dalam jejak digital yang autentik, sehingga meminimalkan risiko manipulasi administrasi dan memperkuat prinsip transparansi dalam tata kelola pemerintahan. Pengaturan surat internal dan eksternal

yang terintegrasi dalam aplikasi JASMIN juga menunjukkan adanya konsistensi dalam penerapan standar persuratan modern yang menuntut akurasi dan efisiensi. Kemampuan menelusuri dokumen secara transparan ini menjadi fondasi penting bagi lembaga pemeriksa negara yang menuntut akurasi dan keabsahan informasi dalam seluruh proses audit.

Kemudian beliau menyatakan tentang pengelolaan arsip dinamis di lingkungan BPK berpedoman pada instrumen kearsipan. Beliau menyebutkan bahwa "*BPK Perwakilan Provinsi Bali saat ini mengacu pada tiga dari empat pilar kearsipan, yaitu Pedoman Tata Naskah Dinas, Kode Klasifikasi Arsip, dan Jadwal Retensi Arsip. Ketiga instrument ini menjadi dasar kami dalam mengelola arsip sejak proses penciptaan hingga penyusutan.* Beliau kemudian menambahkan bahwa pilar keempat, yakni Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAD), "*Memang belum dimiliki oleh BPK, sehingga pengaturan akses arsip sementara masih mengikuti ketentuan internal dan standar keamanan lembaga.*"

Dalam pengelolaan arsip audit, arsiparis berperan memastikan bahwa setiap dokumen ditata dan disimpan berdasarkan pilar kearsipan BPK, yaitu Tata Naskah Dinas, Kode Klasifikasi Arsip, dan Jadwal Retensi Arsip, serta ke depannya mungkin akan diperkuat melalui implementasi Sistem Klasifikasi dan Akses Arsip Dinamis (SKKAD). Sedangkan untuk pemindahan arsip inaktif dari Unit Pengolah kepada Unit Kearsipan berpedoman pada Prosedur Operasional Standar yang telah dimiliki oleh BPK sesuai Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 449/K/X-XIII.2/11/2015 tentang Prosedur Operasional Standar Pemindahan, Penyimpanan, dan Peminjaman Arsip Kertas Kerja Pemeriksaan kepada Unit Pengelola Arsip Badan Pemeriksa Keuangan. Proses pemindahan arsip inaktif yang berasal dari unit kerja pemeriksaan dilaksanakan sesuai pedoman POS tersebut dan telah melalui reviu pejabat Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu Pemeriksaan. Selanjutnya pejabat pengelola KKP dari unit kerja pemeriksaan mengirimkan Nota Dinas disertai Daftar Arsip Inaktif yang akan Dipindahkan kepada pimpinan Unit Kearsipan dalam hal ini Kepala Sekretariat Perwakilan untuk selanjutnya diproses lebih lanjut oleh pengelola arsip di Unit Kearsipan. Peran ini menempatkan arsiparis sebagai penjaga memori organisasi yang memastikan bahwa seluruh dokumen audit memiliki landasan legal dan dapat ditelusuri kembali sebagai bukti pertanggung jawaban publik.

Bu Oky yang merupakan arsiparis pada BPK RI Perwakilan Provinsi Bali Menyampaikan bahwa penerapan sistem persuratan elektronik telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan arsip dinamis di

lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bali. Beliau menjelaskan, "*Ya, penerapan sistem persuratan elektronik di BPK Bali, kebususnya melalui aplikasi JASMIN, terbukti meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan arsip dinamis kami.*" Menurut beliau, peningkatan efisiensi terutama terlihat dari beberapa aspek operasional. Ia menuturkan bahwa, "*Salah satu bentuk efisiensinya adalah akses dan pencarian arsip menggunakan kata kunci, tanggal, pengirim, atau metadata lainnya, sehingga tidak perlu lagi melakukan pencarian manual di lemari arsip fisik.*" Selain itu, beliau juga menambahkan bahwa sistem tersebut memungkinkan transmisi surat secara instan, yang mempercepat alur kerja dan proses pengambilan keputusan. Bu Oky menjelaskan lebih lanjut bahwa penggunaan sistem elektronik juga "*mengurangi ketergantungan pada kertas, sehingga dapat menekan biaya pencetakan, penyimpanan fisik, maupun pengiriman dokumen melalui pos*".

Penggunaan sistem persuratan elektronik tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja, tetapi juga memperkuat akuntabilitas lembaga arsiparis semakin tampak melalui penggunaan fitur audit trail pada sistem persuratan elektronik. Fitur audit trail dalam aplikasi mencatat setiap perubahan maupun aktivitas pengguna, sementara kontrol akses dan manajemen versi mencegah terjadinya duplikasi maupun perubahan dokumen yang tidak sah. Dengan demikian, digitalisasi persuratan menjadi instrument penting dalam menjaga integritas arsip sebagai bukti yang dapat dipercaya. Selain itu, penyimpanan terpusat berbasis elektronik mengurangi ketergantungan pada arsip fisik dan menurunkan risiko kehilangan atau kerusakan dokumen. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya menghadirkan efisiensi proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penguatan akuntabilitas lembaga secara menyeluruh.

Kebutuhan menjaga akuntabilitas tersebut selanjutnya berhubungan erat dengan pengelolaan informasi publik, terutama ketika dokumen audit yang bersifat rahasia menjadi bagian dari permohonan masyarakat. Dalam konteks keterbukaan informasi publik, arsiparis terlibat dalam proses verifikasi permohonan dokumen melalui pedoman Daftar Informasi Publik dan Informasi yang Dikecualikan. Arsiparis memastikan bahwa permintaan informasi dari masyarakat ditangani sesuai ketentuan tanpa mengabaikan perlindungan terhadap arsip audit yang bersifat rahasia. Pendekatan ini mencerminkan prinsip controlled transparency, yakni upaya menjaga keseimbangan antara hak publik untuk mengetahui dan kewajiban negara melindungi informasi yang sensitif. Mekanisme ini memperlihatkan bagaimana akurasi pengelolaan arsip berimplikasi langsung pada kredibilitas lembaga di mata publik.

Mengenai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pengelolaan arsip, informan menyatakan tidak terdapat kendala yang signifikan dalam aspek sarana maupun prasarana. Informan menyatakan, "*Sejauh ini belum ada hambatan yang berarti. Sarana dan prasarana yang kami gunakan sudah cukup memadai untuk mendukung proses pengelolaan arsip.*" Namun demikian, informan menegaskan bahwa salah satu tantangan yang masih dirasakan adalah keterbatasan jumlah arsiparis pada tingkat unit kerja. Lebih lanjut, informan tersebut menjelaskan bahwa, "*Ketersediaan arsiparis belum bisa mencukupi pada masing-masing Unit Pengolah. Jumlah tenaga arsip yang terbatas membuat beberapa proses masih harus dibantu oleh pegawai non-arsiparis.*" Kondisi ini berpotensi memengaruhi kecepatan dan ketepatan pengelolaan arsip apabila jumlah pekerjaan meningkat. Meskipun demikian, menurut informan, koordinasi internal dan dukungan teknologi turut membantu mengurangi dampak dari keterbatasan tersebut.

Meskipun sistem dan sarana prasaran pengelolaan arsip telah memadai, arsiparis menghadapi tantangan utama BPK RI Perwakilan Provinsi Bali adalah keterbatasan jumlah arsiparis. Kekurangan SDM ini menyebabkan sebagian pekerjaan kearsipan masih ditangani oleh pegawai non-arsiparis sehingga berpotensi menimbulkan ketidakteraturan dalam penataan, klasifikasi, maupun retensi arsip. Kondisi tersebut berdampak pada ketidakkonsistenan kualitas pengelolaan arsip antara unit serta meningkatnya beban kerja arsiparis yang ada. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tuntutan organisasi terhadap tata kelola arsip yang profesional dengan kapasitas SDM yang tersedia saat ini.

Keterbatasan SDM tersebut mempengaruhi efektivitas koordinasi antara arsiparis dan unit pemeriksa. Padahal, koordinasi ini merupakan bagian penting dalam menjaga keutuhan arsip audit, terutama melalui kewajiban unit pemeriksa untuk menyusun arsip aktif dan menyerahkannya kepada arsiparis sesuai jadwal retensi. Meskipun prosedur dan regulasi telah mengatur alur koordinasi dengan jelas, efektivitas pelaksanaannya sangat bergantung pada jumlah dan kapasitas arsiparis dalam mengawasi, memverifikasi dan menerima arsip dari tiap unit pemeriksa. Dengan demikian, peran arsiparis dalam menjaga chain of custody dokumen audit sangat dipengaruhi oleh kondisi sumber daya manusianya. Koordinasi antara arsiparis dan unit pemeriksa berjalan berdasarkan ketentuan resmi melalui SK Pengelola Arsip. Setiap unit pemeriksa memiliki kewajiban Menyusun arsip aktif dan berkoordinasi dengan arsiparis dalam proses pemindahan arsip inaktif. Model koordinasi ini memastikan bahwa seluruh dokumen audit memiliki jejak administrasi yang lengkap, akurat, dan terjaga

integritasnya sehingga dapat digunakan kembali dalam proses pemeriksaan maupun tindak lanjut hasil audit.

Di tengah tantangan tersebut, penguatan kompetensi arsiparis juga menjadi aspek penting yang muncul dari hasil penelitian. Arsiparis mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak BPK maupun ANRI serta berbagai seminar dan kursus mandiri. Peningkatan kapasitas ini diperlukan untuk menghadapi kompleksitas pengelolaan arsip di era digital, terutama terkait penggunaan aplikasi persuratan, keamanan dokumen, dan pengelolaan arsip elektronik. Dengan kemampuan yang terus diperbarui, arsiparis dapat menjalankan fungsi profesionalnya secara lebih optimal dan sesuai dengan tuntutan modernisasi birokrasi.

Hal diatas menunjukkan bahwa arsiparis memiliki peran strategis dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi tata kelola persuratan di BPK RI Perwakilan Provinsi Bali. Digitalisasi melalui aplikasi JASMIN menjadi tonggak penting dalam penguatan keterlacakan dan efektivitas kerja birokrasi, sementara sistem kearsipan formal memberikan dasar hukum yang jelas bagi setiap aktivitas pengelolaan arsip. Namun, keterbatasan SDM arsiparis masih menjadi hambatan utama yang perlu ditangani agar sistem kearsipan dapat dijalankan secara optimal dan berkelanjutan. Dengan posisinya sebagai penjaga memori organisasi dan pengendali informasi publik, arsiparis merupakan aktor kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan kredibel.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menegaskan bahwa peran arsiparis dalam lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Bali memiliki kedudukan strategis dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi tata kelola persuratan. Berdasarkan hasil penelitian, arsiparis tidak hanya berfungsi sebagai pengelola dokumen administratif, tetapi juga sebagai penjamin keabsahan informasi audit yang memiliki konsekuensi hukum dan publik. Hal ini sejalan dengan pandangan Sulisty-o-Basuki dalam (Putri, 2022) yang menyatakan bahwa arsiparis merupakan aktor utama dalam menjaga memori organisasi dan kesinambungan informasi kelembagaan sehingga dari itu pentingnya digitalisasi didalamnya. Dalam konteks lembaga pemeriksa negara, keberadaan arsiparis menjadi semakin krusial karena dokumen yang dikelola berkaitan langsung dengan pertanggungjawaban keuangan negara. Penelitian oleh (Rachman et al., 2023) juga menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan arsip berpengaruh signifikan terhadap kredibilitas lembaga publik. Dengan demikian, peran

arsiparis di BPK RI Perwakilan Provinsi Bali dapat dipahami sebagai bagian integral dari sistem pengawasan keuangan negara. Akuntabilitas dan transparansi yang dihasilkan tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil sinergi antara sistem, regulasi, dan profesionalisme arsiparis. Temuan ini memperkuat argumen bahwa pengelolaan arsip yang baik adalah fondasi utama tata kelola pemerintahan yang baik.

Penerapan sistem persuratan elektronik melalui aplikasi JASMIN menjadi salah satu temuan penting dalam penelitian ini yang memperlihatkan transformasi tata kelola arsip di BPK RI Perwakilan Provinsi Bali (BPK, 2023). Digitalisasi persuratan memungkinkan setiap dokumen terekam secara sistematis dan dapat ditelusuri secara real time, sehingga meningkatkan transparansi proses birokrasi. Hal ini sejalan dengan penelitian (Wilkinson, 2016) yang menyatakan bahwa sistem persuratan elektronik mampu meningkatkan keterlacakan (*traceability*) dan mengurangi potensi manipulasi dokumen. Arsiparis berperan sebagai pengelola sekaligus pengawas sistem tersebut, memastikan bahwa setiap surat masuk dan keluar diproses sesuai dengan standar tata naskah dinas. Keberadaan fitur audit trail dalam aplikasi JASMIN juga memperkuat fungsi pengawasan internal terhadap aktivitas persuratan. Penelitian oleh (Fahlevi, 2016) menunjukkan bahwa audit trail dalam sistem informasi kearsipan berkontribusi besar terhadap peningkatan akuntabilitas lembaga publik. Dengan demikian, sistem elektronik tidak hanya menjadi alat bantu teknis, tetapi juga instrumen pengendalian administratif yang strategis. Peran arsiparis dalam mengoperasikan dan mengawasi sistem ini menjadi kunci keberhasilan implementasi digitalisasi persuratan.

Pengelolaan surat masuk dan surat keluar yang dibedakan antara internal dan eksternal menunjukkan adanya sistem kerja yang terstruktur dan terstandarisasi di BPK RI Perwakilan Provinsi Bali. Arsiparis bertanggung jawab memastikan bahwa setiap alur persuratan berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan, baik melalui aplikasi JASMIN maupun mekanisme fisik. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Fahlevi, 2016) yang menyebutkan bahwa kejelasan alur persuratan merupakan indikator penting dalam tata kelola administrasi modern. Pembagian alur internal dan eksternal juga mencerminkan upaya lembaga dalam menjaga efisiensi sekaligus keamanan informasi. Arsiparis berperan penting dalam memverifikasi, mencatat, dan mendistribusikan surat sesuai kewenangan yang berlaku. Dalam konteks transparansi, sistem ini memungkinkan pimpinan dan unit kerja untuk memantau status dokumen secara akurat. Penelitian oleh (Rijaludin et al., 2018) menunjukkan bahwa sistem persuratan terintegrasi mampu meningkatkan kecepatan pengambilan

keputusan organisasi. Dengan demikian, keteraturan persuratan yang dikelola oleh arsiparis berkontribusi langsung terhadap efektivitas kinerja lembaga.

Pengelolaan arsip dinamis di BPK RI Perwakilan Provinsi Bali yang berpedoman pada tiga pilar kearsipan, yaitu Tata Naskah Dinas, Kode Klasifikasi Arsip, dan Jadwal Retensi Arsip, menunjukkan adanya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip kearsipan nasional. Arsiparis memiliki peran sentral dalam menerapkan ketiga instrumen tersebut sejak tahap penciptaan hingga penyusutan arsip. Hal ini sesuai dengan pendapat (Rodiana & Pahlevi, 2020) yang menegaskan bahwa instrumen kearsipan merupakan alat utama dalam menjaga konsistensi dan ketertiban pengelolaan arsip. Ketiadaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAD) di BPK menjadi tantangan tersendiri yang masih diatasi melalui kebijakan internal. Meskipun demikian, arsiparis tetap berupaya menjaga keamanan dan akses arsip sesuai standar lembaga. Penelitian oleh (Rahmah, 2025) menunjukkan bahwa pengaturan akses arsip yang jelas sangat penting dalam lembaga yang mengelola informasi sensitif. Dalam konteks ini, arsiparis bertindak sebagai penjaga integritas informasi yang menyeimbangkan kebutuhan keterbukaan dan kerahasiaan. Peran ini semakin menegaskan posisi strategis arsiparis dalam sistem akuntabilitas kelembagaan.

Pemindahan arsip inaktif dari unit pemeriksa ke unit kearsipan merupakan tahapan penting dalam siklus hidup arsip audit di BPK RI Perwakilan Provinsi Bali. Arsiparis bertanggung jawab memastikan bahwa proses pemindahan tersebut dilakukan sesuai Prosedur Operasional Standar yang berlaku. Hal ini sejalan dengan penelitian (Hermansyah et al., 2023) yang menyatakan bahwa pengelolaan arsip inaktif yang tertib berkontribusi pada kemudahan temu kembali arsip dan perlindungan bukti hukum. Keterlibatan pejabat pengendali teknis dan pengendali mutu pemeriksaan dalam proses ini menunjukkan adanya sistem pengawasan berlapis. Arsiparis berperan sebagai penerima dan pengelola akhir arsip inaktif yang akan disimpan sebagai memori institusi. Dalam konteks akuntabilitas publik, arsip audit yang terkelola dengan baik dapat menjadi alat bukti yang sah apabila diperlukan di kemudian hari. Penelitian oleh (Rachman et al., 2023) menunjukkan bahwa arsip audit memiliki nilai guna sekunder yang tinggi bagi lembaga pemeriksa. Dengan demikian, peran arsiparis dalam pemindahan dan penyimpanan arsip inaktif sangat menentukan kualitas pertanggungjawaban lembaga.

Penerapan sistem persuratan elektronik juga terbukti meningkatkan efisiensi kerja arsiparis di BPK RI Perwakilan Provinsi Bali. Akses dan pencarian arsip berbasis metadata

memungkinkan proses temu kembali dilakukan dengan cepat dan akurat. Hal ini mendukung temuan penelitian oleh (Rahmah, 2025) yang menyatakan bahwa sistem kearsipan digital dapat mengurangi waktu pencarian arsip secara signifikan. Arsiparis tidak lagi bergantung sepenuhnya pada arsip fisik, sehingga risiko kehilangan atau kerusakan dokumen dapat diminimalkan. Selain itu, pengurangan penggunaan kertas sejalan dengan prinsip efisiensi dan keberlanjutan lingkungan. Maka tidak heran jika digitalisasi arsip berdampak positif terhadap penghematan biaya operasional lembaga. Dalam konteks BPK, efisiensi ini juga berdampak pada percepatan proses audit dan tindak lanjut pemeriksaan. Dengan demikian, arsiparis berkontribusi langsung terhadap peningkatan kinerja organisasi melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Aspek akuntabilitas semakin diperkuat melalui penerapan kontrol akses dan manajemen versi dalam sistem persuratan elektronik. Arsiparis berperan memastikan bahwa hanya pihak berwenang yang dapat mengakses atau mengubah dokumen tertentu. Hal ini sejalan dengan penelitian (Darmansyah et al., 2024) yang menegaskan pentingnya pengendalian akses dalam pengelolaan arsip elektronik. Fitur audit trail memungkinkan setiap aktivitas pengguna terekam secara otomatis, sehingga memudahkan proses pengawasan dan evaluasi. Dalam konteks lembaga pemeriksa negara, mekanisme ini sangat penting untuk menjaga integritas dokumen audit. Arsiparis bertindak sebagai pengawas sistem yang memastikan bahwa tidak terjadi perubahan dokumen tanpa otorisasi. Penelitian oleh (Samsiatun & Putra, 2025) menunjukkan bahwa integritas arsip merupakan faktor utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas. Dengan demikian, peran arsiparis dalam pengendalian akses dan audit trail menjadi bagian penting dari sistem akuntabilitas BPK.

Keterlibatan arsiparis dalam pengelolaan informasi publik menunjukkan bahwa transparansi di BPK RI Perwakilan Provinsi Bali diterapkan secara terkendali. Arsiparis memastikan bahwa permohonan informasi dari masyarakat diproses sesuai dengan Daftar Informasi Publik dan Informasi yang Dikecualikan. Transparansi yang efektif harus disertai dengan mekanisme perlindungan informasi sensitif. Konsep controlled transparency yang diterapkan mencerminkan keseimbangan antara hak publik dan kewajiban negara. Arsiparis berperan sebagai filter informasi yang menjamin kepatuhan terhadap regulasi keterbukaan informasi publik. Dalam konteks ini, arsiparis tidak hanya berfungsi teknis, tetapi juga menjalankan peran etis dan hukum. Penelitian oleh (Hermansyah et al., 2023) menunjukkan bahwa pengelolaan arsip yang profesional berpengaruh terhadap citra positif lembaga publik.

Dengan demikian, peran arsiparis berkontribusi langsung terhadap kredibilitas BPK di mata masyarakat.

Meskipun sistem dan sarana prasarana telah memadai, keterbatasan jumlah arsiparis menjadi tantangan utama dalam pengelolaan arsip di BPK RI Perwakilan Provinsi Bali. Kekurangan sumber daya manusia menyebabkan sebagian pekerjaan kearsipan masih ditangani oleh pegawai non-arsiparis. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian (Darmansyah et al., 2024) yang menyebutkan bahwa kekurangan tenaga arsiparis dapat memengaruhi konsistensi kualitas pengelolaan arsip. Beban kerja arsiparis yang tinggi juga berpotensi menurunkan efektivitas pengawasan terhadap arsip audit. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tuntutan profesionalisme dan kapasitas SDM yang tersedia. Maka dari itu jumlah dan kompetensi arsiparis harus sebanding dengan volume arsip yang dikelola. Dalam konteks BPK, peningkatan jumlah arsiparis menjadi kebutuhan strategis. Dengan demikian, penguatan SDM arsiparis merupakan prasyarat penting bagi keberlanjutan sistem kearsipan yang akuntabel.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa arsiparis memiliki peran sentral dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi persuratan di BPK RI Perwakilan Provinsi Bali. Digitalisasi melalui aplikasi JASMIN, penerapan instrumen kearsipan, serta mekanisme pengendalian akses menjadi faktor pendukung utama keberhasilan pengelolaan arsip. Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menegaskan pentingnya peran arsiparis dalam tata kelola pemerintahan modern. Namun, keterbatasan jumlah arsiparis masih menjadi hambatan yang perlu mendapat perhatian serius. Peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan penguatan SDM menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan tersebut. Arsiparis tidak hanya bertindak sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai penjaga memori organisasi dan penjamin akuntabilitas publik. Dengan peran tersebut, arsiparis berkontribusi langsung terhadap terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Oleh karena itu, penguatan peran arsiparis perlu menjadi bagian dari agenda reformasi birokrasi di lingkungan BPK RI.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa arsiparis memiliki peran strategis dan signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi persuratan di BPK RI Perwakilan Provinsi Bali. Peran tersebut terlihat dari tiga hal utama yakni: 1)

Arsiparis berperan sebagai pengendali sistem pengelolaan arsip dan persuratan yang terstruktur dan berbasis regulasi. Implementasi aplikasi JASMIN telah memperkuat keterlacakan dokumen, meningkatkan efisiensi alur komunikasi kedinasan, serta mendukung transparansi melalui pencatatan digital yang terintegrasi dan tidak dapat dimanipulasi. Penerapan instrumen formal seperti Tata Naskah Dinas, Kode Klasifikasi Arsip, dan Jadwal Retensi Arsip memastikan bahwa setiap dokumen audit dikelola dengan prinsip keutentikan, keutuhan, dan validitas sebagai dasar pertanggungjawaban proses pemeriksaan keuangan negara. 2) Arsiparis berperan sebagai mediator antara keterbukaan informasi publik dan perlindungan data rahasia negara. Melalui implementasi pedoman Daftar Informasi Publik dan Informasi yang Dikecualikan, arsiparis memastikan pemberian informasi kepada masyarakat dilakukan secara selektif, proporsional, dan sesuai ketentuan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa arsiparis tidak hanya mengelola arsip secara teknis administrative, tetapi juga memegang tanggung jawab etis dalam menjaga integritas dan kredibilitas lembaga. 3) Penelitian mengidentifikasi bahwa keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) arsiparis masih menjadi hambatan structural dalam menjamin konsistensi kualitas pengelolaan arsip di seluruh unit kerja. Beban kerja yang tinggi dan pelibatan pegawai non arsiparis dalam tugas kearsipan berpotensi menurunkan ketertiban dan standar pengelolaan arsip. Oleh karena itu peningkatan kapasitas kelembagaan melalui penambahan SDM arsiparis, penguatan koordinasi antarunit, serta pengembangan kompetensi berkelanjutan melalui pelatihan internal dan eksternal menjadi urgensi untuk menjawab tantangan digitalisasi dan kompleksitas dokumen audit di era ini.

Kontribusi penelitian ini memberikan secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai peran strategis arsiparis sebagai aktor kunci dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi birokrasi melalui pengelolaan arsip dan persuratan berbasis digital. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai implementasi sistem persuratan elektronik JASMIN dan penerapan instrumen kearsipan di BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, yang dapat menjadi rujukan bagi instansi pemerintah lainnya. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya konsep *controlled transparency* dalam pengelolaan informasi publik, khususnya pada dokumen audit yang memiliki tingkat kerahasiaan tinggi. Selain itu, temuan terkait keterbatasan sumber daya manusia arsiparis dapat menjadi bahan evaluasi bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi penguatan kearsipan kelembagaan. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam

mendukung upaya reformasi birokrasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang berintegritas.

Rekomendasi penelitian selanjutnya disarankan 1) memperluas cakupan objek penelitian dengan melibatkan lebih dari satu perwakilan BPK atau lembaga pemeriksa lainnya guna memperoleh perbandingan praktik pengelolaan arsip dan persuratan secara lebih komprehensif. 2) Menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran untuk mengukur secara lebih objektif pengaruh sistem persuratan elektronik terhadap tingkat efisiensi, akuntabilitas, dan kepuasan pengguna layanan informasi. 3) Kajian khusus mengenai implementasi Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAD) perlu dilakukan untuk melihat kesiapan lembaga dalam mengelola arsip elektronik yang semakin kompleks. 4) Menelaah aspek kompetensi dan beban kerja arsiparis secara lebih mendalam, terutama dalam kaitannya dengan keterbatasan sumber daya manusia. Dengan pengembangan fokus tersebut, diharapkan penelitian lanjutan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif dalam memperkuat peran arsiparis dan sistem kearsipan di sektor publik.

DAFTAR PUSTAKA

- BPK. (2023). *Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bali Tahun 2023*. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali.
- Darmansyah, T., Dermawan, M. M., Habib, F., & Siregar, A. R. (2024). Analisis Tata Cara Pengelolaan Arsip Elektronik dalam Manajemen Persuratan. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Konseling*, 2(1), 144–151. <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jpdsk/article/view/969>
- Fadhallah, R. A. (2020). *Wawancara dalam Penelitian*. Les Publisher.
- Fahlevi, M. R. (2016). *Pengaruh Kualitas Pengendalian Internal Sistem Informasi Akuntansi terhadap Keandalan Audit Trail pada PT. Pelindo I (PERSERO) Belawan Internasional Container Terminal Medan* [Student paper, Universitas Medan Area]. <https://repositori.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/23245>
- Hermansyah, D., Aulianto, D. R., Raharja, T. D., & Firnalia, F. (2023). Persepsi Arsiparis terhadap Implementasi Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan*, 9(2), 189–200. <https://doi.org/10.14710/lenpust.v9i2.54990>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Nurhidayat, I. (2023). Good Governance dan Penguatan Tata Kelola Arsip Pemerintah. *Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 88–101. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JIAN/article/view/1110>

- Prawiyogi, A. G., Sadiyah, T. L., Purwanugraha, A., & Elisa, P. N. (2021). Penggunaan Media Big Book untuk Menumbuhkan Minat Membaca di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(1), 446–452. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i1.787>
- Putri, F. A. (2022). Peran Arsiparis dalam Pengelolaan Otomasi Arsip di Era Digital. *ABDI PUSTAKA: Jurnal Perpustakaan dan Kearsipan*, 2(2), 53–57. <https://doi.org/10.24821/jap.v2i2.6928>
- Rachman, R. M., Santoso, B., & Muhidin, S. A. (2023). Efektivitas Sosialisasi Kearsipan untuk Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Arsip di Sekolah Tinggi Desain Indonesia. *ABDI PUSTAKA: Jurnal Perpustakaan dan Kearsipan*, 3(1), 40–63. <https://doi.org/10.24821/jap.v3i1.7350>
- Rahmah, A. (2025). Pengelolaan Arsip Berbasis Elektronik Digital. *Jurnal Pendidikan, Hukum, Komunikasi*, 1(5), 89–103. <https://doi.org/10.69623/j-dikumsi.v1i2.133>
- Rantiasih, R. (2022). *Model Pemberkasan Arsip Dinamis Aktif di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia* [Politeknik STIA LAN Jakarta]. <https://repository.stialan.ac.id/id/eprint/227/>
- Rijaludin, Purnama, M. E., Witanti, W., & Hadiana, A. I. (2018). Pengaruh Sistem Informasi Administrasi Persuratan Terintegrasi Jurusan Informatika dan Fakultas MIPA Universitas Jenderal Achmad Yani. *Jurnal Mnemonic*, 1(1), 25–31. <https://www.ejournal.itn.ac.id/mnemonic/article/view/16>
- Rodiana, S., & Pahlevi, T. (2020). Pengembangan Instrumen Penilaian Berbasis Higher Order Thinking Skills (HOTS) pada Mata Pelajaran Kearsipan Jurusan OTKP di SMKN 1 Sooko Mojokerto. *Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran (JPAP)*, 8(1), 82–95. <https://doi.org/10.26740/jpap.v8n1.p82-95>
- Romdona, S., Junista, S. S., & Gunawan, A. (2025). Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara, dan Kuesioner. *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik*, 3(1), 39–47. <https://doi.org/10.61787/taceee75>
- Samsiatun, R., & Putra, P. (2025). Integrasi Pengelolaan Arsip Konvensional dan Elektronik dalam Administrasi BOSP di SD Muhammadiyah Mulusan I. *Journal of GLAM Terekam Jejak*, 1(2), 82–97. <https://jpm.terekamjejak.com/index.php/jglam/article/view/131>
- Schafer, V., & Winters, J. (2021). The values of web archives: Good governance, accountability, transparency, inclusiveness and legality. *International Journal of Digital Humanities*, 2, 129–144. <https://doi.org/10.1007/s42803-021-00037-0>
- Supriatna, D., Suhendi, D., & Jamil, N. M. (2025). *Modul Tata Naskah Dinas: Permendagri Nomor 18 Tahun 2024*.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods*. SAGE Publications Inc. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/case-study-research-and-applications/book250150>